

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDONESIA MENJALIN KERJASAMA KEANTARIKSAAN DENGAN TIONGKOK

Kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi negara Tiongkok dibidang antariksa jadi salah satu potensi besar negara tersebut untuk dapat menarik mitra aliansi. Indonesia yang merupakan negara dengan teknologi masih jauh dibawah tiongkok melihat potensi besar dari negara Tiongkok tersebut yang mana kemajuan teknologi antariksanya setara dengan negara Amerika dan Rusia. Sehingga, adanya potensi besar itu membuat Indonesia ingin menajalin kerjasama untuk dapat mengembangkan teknologi antariksa Indonesia. Langkah awal yang diambil oleh Indonesia dalam kerjasama tersebut adalah dengan ikut andil menandatangani *Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)*.

Pasca penandatanganan Kemitraan Strategis antara presiden RI dan presiden Tiongkok, hubungan kedua negara semakin berkembang pesat ditandai dengan beberapa pencapaian penting, antara lain pembentukan mekanisme dialog tingkat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dengan dewan negara (*State Councillor*) pada Juli 2005; Forum Konsultasi Kerjasama Maritim pada Desember 2006; dan Perjanjian Ekstradisi pada Juli 2009. Kemudian lebih lanjut pada Pertemuan Dialog ke-2 Tingkat Menteri Koordinator Politik-Hukum dengan Dewan Negara (*State Councillor*) pada tanggal 21 Januari 2010, di Jakarta, ditandatangani *Plan of Action (PoA)* yaitu deklarasi bersama Kemitraan Strategis

Indonesia-Tiongkok yang berisi berbagai program kegiatan konkret sebagai upaya implementasi butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam Deklarasi Bersama tersebut untuk periode 5 tahun ke depan 2010-2015.¹

Pada tanggal 22-24 Maret 2012, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Tiongkok untuk mempertegas hubungan kedua negara tersebut. Kunjungan itu diterima secara langsung oleh empat pejabat dari partai komunis Tiongkok di Beijing. Keterlibatan para pejabat penting dalam pertemuan tersebut menunjukkan bahwa perilaku politik luar negeri Tiongkok lebih bersifat adaptif terhadap lingkungan strategisnya, dibandingkan pada masa sebelumnya yang dikenal sangat tertutup. Perubahan perilaku ini sebagai tanda bahwa Tiongkok ingin lebih membuka hubungan baik di kawasan Asia-Pasifik.²

Pada tahun 1992, Tiongkok membentuk organisasi *Asia Pasific Multilateral Cooperation in Space Technology and Applications* (APMCSTA) yang merupakan langkah awal terbentuknya *Asia-Pasific Space Cooperation Organization* (APSCO). Pada tanggal 28 Oktober 2005 APSCO resmi ditanda tangani oleh 8 negara yaitu Tiongkok, Indonesia, Bangladesh, Iran, Mongolia, Pakistan, Peru dan Thailand. APSCO juga sebagai alat Tiongkok dalam kepentingan memperluas wilayah

¹ *Ibid.*

² McGowan, Patrick. 1974. "Adaptive Foreign Policy Behaviour: An Empirical Approach" (dalam James N. Rosenau (ed.) *Comparing Foreign Policies: Theories, Findings and Methodes*). New York: Sage Publication, 1974

pengaruhnya (*sphere of influences Tiongkok*) di lingkup internasional dengan mengandalkan teknologi antariksa.

APSCO sekaligus menjadi harapan Tiongkok dalam menarik kekuatan-kekuatan antariksa dalam lingkup sebuah kelompok, dimana Tiongkok yang memposisikan diri sebagai pemimpin dapat melakukan upaya penelitian bersama dan pertukaran data. Peranan di dalam APSCO juga melatih para ilmuwan dan insinyur di kawasan Asia Pasifik dalam teknologi antariksa dan penginderaan jauh. Indonesia juga tetap menerima bantuan dari Tiongkok berupa pendidikan dan pelatihan yang berlangsung hingga saat ini, meskipun Indonesia belum menjadi anggota tetapnya. Melalui upaya tersebut, Tiongkok telah menunjukkan bahwa dirinya mampu berperan sebagai penyedia dan pembelajaran teknologi bagi kawasan kurang berkembang (*lesser developed*) di Asia dan kawasan lain, menggantikan Jepang yang telah lebih dulu unggul pada kemampuan tersebut.

A. Kondisi Teknologi Antariksa Indonesia

Teknologi antariksa dapat digunakan untuk berbagai aplikasi pertahanan dan keamanan nasional, termasuk pengintaian, meteorologi, rudal peringatan dini, komunikasi, dan navigasi. Indonesia telah lebih dari 20 tahun menjadi negara pengoperasi dan pengguna teknologi antariksa serta termasuk dalam jajaran negara pengguna yang paling awal dikawasan Asia Tenggara, namun Indonesia masih harus mengembangkan penguasaan teknologi antariksanya.

Untuk melindungi rahasia negara misalnya, Indonesia harus meningkatkan teknologi ruang angkasanya. Ketika Australia melakukan penyadapan telepon kepada Ani Yudhoyono, yang sebenarnya jadi kejahatan luar biasa dan pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. negara kita tidak bisa berbuat apa-apa karena teknologi ruang angkasanya masih tertinggal. Oleh sebab itu, Indonesia harus meningkatkan teknologi ruang angkasa untuk mengelola dan menghasilkan teknologi ruang angkasanya sendiri.

Indonesia merupakan negara dengan geografis yang unik. Unik disini adalah karena Indonesia memiliki banyak pulau yang juga memiliki kekayaan alam berlimpah. Hal ini membuat pemerintah Indonesia harus memiliki suatu teknologi yang kuat untuk dapat menjaga dan melindungi segala kekayaan yang Indonesia miliki. Indonesia memiliki LAPAN yang merupakan lembaga untuk pengembangan teknologi keantariksaan Indonesia. Namun, fungsi dari LAPAN belumlah maksimal karena keterbatasan akan teknologi antariksanya. Melihat Tiongkok sebagai negara dengan potensi teknologi antariksa yang besar, Indonesia mengambil langkah untuk menjalin kerjasamanya dengan negara tersebut.

B. Teknologi Antariksa Tiongkok

Tiongkok pertama kali meluncurkan satelitnya pada tahun 1970. Sejak saat itu, Tiongkok telah meluncurkan 79 satelit. Dari jumlah tersebut, 67 satelit sukses mengorbit, 8 satelit mengalami kegagalan total, dan 4 satelit gagal dalam penempatannya ke orbit. Sebagian besar dari peluncuran satelit tersebut adalah satelit

komunikasi, satelit cuaca, penginderaan jauh, dan satelit navigasi.

Tiongkok telah muncul sebagai kekuatan baru yang mampu menyaingi Amerika dan Rusia karena mempunyai kemampuan mandiri dalam keantariksaan. Hal itu dibuktikan setelah pesawat ruang angkasa tak berawaknya sukses mendarat dibulan pada tahun 2013. Misi tersebut merupakan yang pertama kali setelah Amerika dan Rusia lakukan 1979. Pesawat yang luar angkasa yang menjalankan misi ke bulan itu bernama *Chang'e 3*.

Tiongkok juga memiliki satelit komunikasi yang sangat baik untuk negaranya. Satelit komunikasi ini bernama TiongkokSAT 11. Satelit milik *Tiongkok Satellite Communications Corp* ini bisa digunakan dalam mendukung siaran televisi dan data untuk pelanggan komersial di Asia.

Tiongkok juga merupakan negara yang memiliki stasiun luar angkasanya sendiri, yaitu *Tiangong 1*. Karena sebagian besar negara-negara yang memiliki teknologi antariksa tidak memiliki stasiun luar angkasa melainkan mereka tergabung dalam *International Space Station (ISS)* yang dipimpin oleh Amerika.

C. Kerjasama Indonesia dengan Tiongkok Dibidang Antariksa

Pada dasarnya, Indonesia dan Tiongkok sudah lama menjalin kerjasama dibidang ekonomi dan industri. Melihat potensi teknologi antariksa Tiongkok yang canggih, membuat Indonesia ingin melakukan kembali kerjasama dibidang antariksa. Hal ini juga tidak sulit dilakukan oleh Indonesia karena Tiongkok pun memandang Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki potensi besar di masa depan dalam

bidang teknologi. Indonesia dan Tiongkok sama-sama merupakan *emerging markets* atau pasar negara berkembang yang sangat mempunyai potensi besar, sehingga sebagai negara yang sama-sama berkembang, Indonesia dan Tiongkok harus dapat mendukung satu sama lainnya seperti Indonesia harus dapat mendukung Tiongkok dalam posisi tawar-menawar dalam kancah politik internasional, kemudian Tiongkok juga diharapkan dapat mendukung Indonesia untuk kemajuan teknologinya.

Sesuai dengan naskah perjanjian antara Tiongkok dan Indonesia di bidang kerja sama eksplorasi dan pemanfaatan antariksa untuk maksud damai yang ditandatangani pada 2013 di Jakarta, Indonesia dan Tiongkok melaksanakan pertemuan Komite Bersama. Pertemuan tersebut berlangsung pada 9 hingga 11 Maret 2015 di Beijing, Tiongkok.

Wu Yanhua sebagai ketua Komite Bersama pihak Tiongkok dan Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin sebagai Ketua Komite Bersama pihak Indonesia. Pertemuan Pertama Komite Bersama Kerja Sama di Bidang Antariksa tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan perjanjian yang telah ditandatangani.

Pada pertemuan tersebut Indonesia dan Tiongkok telah merumuskan kerangka kerjasama di bidang keantariksaan selama periode 2015-2020. Kerangka kerjasama tersebut meliputi 11 bidang yang terdiri dari :

Tabel 1 Kerjasama Indonesia dan Tiongkok di Bidang Antariksa

| No | Bidang Kerjasama | Isi | |
|----|--------------------|-----|--|
| 1 | Peluncuran satelit | 1.1 | Kerjasama penyediaan peluncuran satelit dengan <i>piggyback</i> untuk satelit penginderaan jauh LAPAN-A4 |
| | | 1.2 | Kerjasama peluncuran satelit Indonesia di masa depan |
| 2 | Observasi Bumi | 2.1 | Kerjasama riset dan pengembangan satelit observasi bumi untuk Indonesia |
| | | 2.2 | Kerjasama dalam Tiongkok-Asean Satellite Information Maritime Application Center |
| | | 2.3 | Kerjasama dalam stasiun bumi aplikasi satelit penginderaan jauh |
| | | 2.4 | Kerjasama dalam Tiongkok-Asean Remote Sensing Satelit data Sharing Platform |
| | | 2.5 | Kerjasama dalam aplikasi data penginderaan jauh dibidang meteorologi, pengawasan samudera dan hutan, dan lain-lain |
| | | 2.6 | Kerjasama pertukaran data satelit penginderaan jauh dengan prinsip timbal balik |

| | | | |
|---|------------------------------------|-----|--|
| 3 | Satelit komunikasi | 3.1 | Kerjasama pengembangan dan operasi bersama system satelit pengumpulan data (<i>Data Collection Satellite System/DCSS</i>) |
| | | 3.2 | Kerjasama pengembangan satelit komunikasi di Indonesia, dalam bidang pendidikan jarak jauh, komunikasi darurat, sistem e-goverment dan lain-lain |
| 4 | Satelite Navigasi | 4.1 | Kerjasama dalam percobaan aplikasi beidou/sistem navigasi satellite global (global navigation satellite system/GNSS) dan penggunaannya dibidang maritime, pencegahan bencana, transportasi dan lain-lain |
| | | 4.2 | Kerjasama pengembangan bersama stasiun pengawasan GNSS di Indonesia |
| | | 4.3 | Kerjasama riset dan pengembangan sistem penguatan, layanan, dan terminal satelit navigasi |
| 5 | Telemetri, penjejukan, dan control | 5.1 | Melaksanakan misi TT&C dengan kapal Yuan Wang diwilayah perairan Indonesia |
| 6 | Roket Sonda | 6.1 | Kerjasama pengembangan roket sonda |

| | | | |
|----|---|------|---|
| 7 | Fasilitas Keantariksaan | 7.1 | Kerjasama desain perancangan dan pengembangan fasilitas assembly, integration and test (AIT) untuk Indonesia |
| | | 7.2 | Kerjasama peralatan dan fasilitas darat |
| | | 7.3 | Kerjasama kajian kelayakan membangun fasilitas peluncuran diindonesia, diusulkan oleh Indonesia |
| 8 | Sub-sistem/insrumen/komponan/material satelit | 8.1 | Kerjasama dalam sub-sistem/insrumen/komponan/material satelit |
| 9 | Sains Antariksa | 9.1 | Kerjasama observasi bersama cuaca antariksa, kajian kelayakan membentuk stasiun pengawasan bercuaca antariksa bersama |
| 10 | Pelatihan dan pendidikan | 10.1 | Kerjasama pendidikan akademis dan pelatihan teknologi bidang antariksa |
| | | 10.2 | Kerjasama pelatihan sains antariksa, teknologi antariksa, penggunaan antariksa dan lain-lain |
| 11 | Teknologi Aeronautika | 11.1 | Kerjasama pengembangan pesawat terbang nirawak |
| | | 11.2 | Kerjasama pengembangan dan pelayanan uji coba terowongan angin |

Sumber : MoU Garis Besar Kerjasama di Bidang Kedirgantaraan 2015-2020 Antara Lembaga

Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia dan Administrasi Antariksa
Nasional Republik Rakyat Tiongkok

D. Analisa Teori

1. Model Aktor Rasional

Model aktor rasional adalah salah satu model proses pembuatan keputusan politik luar negeri suatu negara. Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintahan yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan.³ Pemerintahan yang monolit ditafsirkan oleh penulis sebagai pemerintahan suatu negara yang mempunyai dasar negara kuat, pemerintahan yang solit dan mempunyai kepentingan nasional yang mendapat persetujuan rakyatnya. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu.

Dalam aktor rasional untuk menentukan pilihannya atau menentukan tindakan, aksi atau apapun itu selalu didasarkan pada asas untung rugi. Jika

³ Mohtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional "Disiplin dan Metodologi" (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1990), hal. 235.

aktor rasional melihat adanya keuntungan, bisa dipastikan suatu pilihan atau tindakan itu pasti akan terjadi dan aktor rasional akan selalu membandingkan untung dan ruginya suatu tindakan tersebut.

Pemerintah Indonesia menjadi aktor penting dalam mengambil keputusan kerjasama dengan Tiongkok dengan harapan jika Indonesia melakukan kerjasama dibidang antariksa ini dengan Tiongkok, Indonesia akan mendapatkan transfer teknologi satelit-satelit yang diantaranya berupa satelit penginderaan jarak jauh, satelit komunikasi, kemudian Indonesia juga mendapatkan jasa peluncuran, penjejukan dan pengendalian satelit-satelit termasuk manajemen dan operasi orbitnya.

1.1 Tiongkok Sebagai Negara Besar yang Dapat Mengembangkan Teknologi Antariksa dalam Waktu Cukup Singkat

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Tiongkok telah muncul sebagai kekuatan baru di regional dan perubahan perilaku Tiongkok ini secara fundamental membawa perubahan dalam hubungan internasional dimana akan memaksa aktor negara bangsa untuk mengubah agenda politik luar negerinya, tidak terkecuali Indonesia yang melihat hubungan dengan Tiongkok tidak lagi dipenuhi oleh persoalan-persoalan ideologi di masa lalu. Pertimbangan ideologi saat ini telah mengalami pergeseran yang signifikan dikalahkan oleh pertimbangan pragmatis yaitu Tiongkok sebagai

kekuatan baru di dunia sangat berperan dalam menciptakan sebuah tatanan regional yang dikehendaki oleh para pemimpin Tiongkok. Indonesia merupakan mitra terbesar Tiongkok dan menjadi tujuan ekspor terbesar setelah Amerika Serikat. Fakta tersebut tentunya memberikan peluang bagi Indonesia untuk dapat masuk ke pasar global, terlebih lagi Tiongkok dikenal sebagai negara dengan teknologi yang sudah maju.

Tentunya kemunculan Tiongkok ini memiliki banyak indikator pendukung yang berfungsi sebagai pilar-pilar kesuksesan Tiongkok di internasional. Dua indikator penting itu adalah *Pertama*, yang bersifat *hard power* seperti ekonomi dan militer khususnya teknologi antariksa. Kemampuan *hard power* tersebut mampu membuat Tiongkok mentransformasi diri dari Negara yang tertutup menjadi Negara yang dalam kondisi tertentu mampu dan siap melakukan intervensi terhadap pihak lain. *Kedua*, yang bersifat *soft power* sebagai aktualisasi kemampuan diplomasi internasional dalam mempengaruhi pihak lain. Sehingga dengan kepemilikan *hard power* yang demikian hebat tersebut, Tiongkok kemudian mampu secara *soft power* mengaktualisasikan kemampuannya dengan meningkatkan penampilan dalam diplomasi internasionalnya yang ditujukan untuk mempengaruhi pihak lain khususnya Indonesia.

Proses pengembangan teknologi yang dilakukan oleh Tiongkok selama ini dapat dikategorikan sebagai pengembang teknologi antariksa

yang sangat efisien. Proses ini patut dicontoh oleh Indonesia karena saat ini negara berkembang seperti India, Pakistan, Malaysia dan lain-lain sudah mampu menciptakan beberapa part bahkan hampir seratus persen teknologi antariksanya.

Kebutuhan yang sangat mendesak bagi Indonesia adalah untuk pemenuhan kebutuhan negaranya sendiri karena luas dan besarnya aspek geografi yang dimiliki. Tiongkok yang secara terbuka menawarkan kerjasama dalam hal ini sepatutnya ditanggapi dengan bijaksana. Proses kerjasama yang saling menguntungkan dan lepas dari kepentingan lain selain untuk tujuan damai dan pengembangan ilmu keantariksaan.

1.2 Peningkatan Posisi Tawar Indonesia dalam Politik Internasional

Kerjasama Indonesia dengan Pemerintah Tiongkok tersebut akan berpengaruh pada posisi Indonesia sebagai negara maritime dan kepulauan yang besar tentunya akan mengundang ketertarikan pihak lain atau negara lain. Ketertarikan tersebut dilihat dari sisi peran Indonesia sebagai individu negara atau dengan melihat keterlibatan peran Indonesia dalam organisasi-organisasi kerjasama multilateral. Tentu saja hal ini menarik Tiongkok sebagai kekuatan baru di Asia Pasifik atau dapat juga disebut dengan *regional power*, yang sangat berkepentingan untuk melibatkan Indonesia menjadi bagian dari *grand strategi* Tiongkok di Asia Tenggara. Konsekuensi yang akan dihadapi Indonesia adalah potensi keamanan dan

kedaulatan Indonesia dimasuki oleh Tiongkok yang bisa mengakibatkan Tiongkok bisa dengan bebas mengawasi wilayah perairan Indonesia.⁴

Keputusan Indonesia untuk bekerjasama dengan Tiongkok tentunya ada keuntungan yang akan didapatkan oleh Indonesia. Tidak hanya teknologi saja yang didapat tetapi ada keuntungan-keuntungan yang lain yang didapatkan Indonesia. Keuntungan tersebut seperti, Indonesia akan mendapatkan kesejahteraan dan ketahanan bangsa dan negara melalui pemanfaatan atas ruang udara dan ruang antariksa yang didasari oleh konsepsi Wawasan Nusantara dimana wilayah nasional dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan dan ketahanan bangsa dan negara tersebut.

Dalam hal penguasaan teknologi dirgantara, khususnya pembuatan pesawat terbang, Indonesia dapat dikatakan telah berhasil mengurangi tingkat ketergantungan teknologi kedirgantaraan pada negara lain. Keberhasilan pembuatan pesawat terbang N-250 yang dibuat pada tahun 1996, dan pesawat R-80 yang merupakan pengembangan dari pesawat N-250 yang dimulai sejak tahun 2013 merupakan bukti nyata keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan penguasaan teknologi pembuatan pesawat terbang.

⁴ Hidayat, Loc. Cit (Dalam Wawancara yang sama)

1.3 Perkiraan Kerugian Indonesia dan Antisipasi

Namun demikian, keberhasilan tersebut kurang diimbangi oleh keberhasilan dalam penguasaan teknologi antariksa seperti pembuatan satelit, roket, wahana dan bandara antariksa lainnya. Indonesia masih harus bergantung pada negara lain untuk penguasaan teknologi antariksa. Hal yang sama juga terjadi pada teknologi pembuatan sistem navigasi dan panduan terbang yang mutakhir. Program antariksa adalah simbol *prestige* nasional yang diakui secara universal. Sehingga jika Indonesia memiliki program antariksa yang canggih tentunya akan dapat meningkatkan *prestige* dimata dunia.

Hal-hal diatas tentunya akan dapat diimbangi dan diraih oleh Indonesia jika melakukan alih teknologi dengan Tiongkok. Kerjasama dengan Tiongkok dalam hal antariksa tentunya akan menjadikan Indonesia negara yang hebat. Namun, dibalik keuntungan yang didapat, pastinya akan ada resiko yang didapat dan timbal balik yang harus Indonesia berikan ke Tiongkok. Indonesia harus bersedia mengizinkan kapal-kapal Tiongkok berlabuh di perairan Indonesia, hal ini secara tidak langsung mengakibatkan Tiongkok dengan leluasa mengeksplorasi perairan Indonesia. Sehingga hal ini sebenarnya harus sangat menjadi perhatian dari pemerintah Indonesia.

Program antariksa merupakan pendorong penting bagi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bisnis dan pendidikan di sekolah-sekolah.

Pendidikan di Indonesia saat ini masih belum merata keseluruh penjuru nusantara, dengan adanya kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok membuka peluang bagi Indonesia untuk bisa merata karna teknologinya akan semakin maju. Sedangkan dalam bisnis sangat jelas bahwa teknologi itu sangat penting didalam keberlangsungan bisnis tersebut.

Pada akhirnya, kemajuan teknologi antariksa akan membuat kemajuan dalam bidang lainnya seperti teknologi, militer, pertahanan nasional, ekonomi, manajemen, budaya dan lainnya. Oleh karena itulah setelah menyimak pembahasan teori diatas maka penting rasanya jika Indonesia menerima tawaran dan menjalin kerjasama ini dengan Tiongkok. Selain untuk mengembangkan teknologi antariksa dan transfer teknologi, kerjasama ini juga pastinya akan sangat menguntungkan Indonesia karena beberapa negara yang dimana teknologi antariksanya sangat maju sudah menutup diri untuk melakukan kerjasama ini terkecuali Tiongkok.

2. Konsep Kerjasama

Sebagian besar transaksi dan interaksi di antara negara-negara dalam sistem internasional dewasa ini adalah bersifat rutin dan hampir bebas konflik. Timbul berbagai masalah nasional, regional, atau global yang memerlukan perhatian dari banyak negara. Dalam kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah negara saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu

penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini disebut kolaborasi atau kerjasama.

Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda. Kebanyakan transaksi dan interaksi kerjasama terjadi secara langsung diantara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama.

Dari paparan konsep diatas, K. J. Holsti menjelaskan bahwa konsep kerjasama terjadi secara langsung diantara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama. Bahkan, kepentingan suatu negara bisa dipaksakan ke negara lain tanpa harus adanya konflik, yaitu dengan saling bertukar kepentingan lalu menyelaraskannya menjadi sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Masalah yang dihadapi Tiongkok adalah mereka tidak bisa meluncurkan satelit mereka sendiri didarat maupun diperairan mereka sendiri. Sedangkan Indonesia sendiri adalah negara dengan garis khatulistiwa terpanjang didunia sebanyak 13% yang mana ini adalah kesempatan bagi Tiongkok untuk bisa dengan tepat dan mudah meluncurkan satelit yang mereka inginkan.

2.1 Indonesia akan Lebih Cepat Ikut Andil Dalam Organisasi Antariksa Duniaa

Kerjasama yang ditawarkan Tiongkok ini sangat jelas bisa menguntungkan Indonesia dan juga Tiongkok. Dimana negara-negara yang memiliki teknologi antariksa yang sangat maju sudah tertutup untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia. Sedangkan Tiongkok sangat terbuka karena mereka memiliki kepentingan dan Indonesia sangat beruntung bisa meningkatkan teknologi antariksa agar bisa bersaing dengan negara-negara asia lainnya dan juga untuk menjaga keamanan wilayah dan kedaulatan negara Indonesia sendiri.

Kerjasama dengan Tiongkok sebagai anggota tetap dalam *Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)* akan membantu Indonesia menjadi anggota tetap dalam *Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)*. Karena saat ini Indonesia belum menjadi anggota tetap dalam APSCO. Dengan berjalannya kerjasama ini, Indonesia akan mendapatkan aliansi strategis dengan bergabung menjadi anggota tetap *Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)*. Karena teknologi antariksa Indonesia akan meningkat pesat dan bisa bersaing dengan negara-negara lainnya.

Namun kerjasama ini juga harus dilandasi oleh prinsip-prinsip *space treaty*. Dengan peluncuran Sputnik I pada 4 oktober 1957, sejarah

memasuki Abad Ruang Angkasa (*Space Age*). Sejak itu terjadilah kegiatan pada dataran internasional, terutama lewat forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk menciptakan hukum internasional yang bisa dijadikan sebagai kerangka normative bagi kegiatan negara-negara di ruang angkasa. Tanpa tatanan norma sedemikian, dikhawatirkan ruang angkasa akan menjadi ajang konflik kepentingan antar bangsa, khususnya antara dua negara adi kuasa yang saling berebut pengaruh politik dan militer, Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Latar belakang kekhawatiran tersebut memberi ciri yang kuat pada perjanjian internasional yang kemudian lahir pada tanggal 27 januari 1967, yang dinamakan *Treaty of Principles governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moor and Other Celestial Bodies*. Perjanjian internasional yang dikenal dengan nama singkat Perjanjian Ruang Angkasa (*Space Treaty*) tersebut kemudian diakui sebagai perjanjian induk yang memuat prinsip-prinsip utama guna mengatur kegiatan keantariksaan, dan menjadi rujukan dasar bagi perjanjian-perjanjian internasional di bidang keantariksaan selanjutnya. Oleh karena itu banyak ahli menanamkan perjanjian tersebut sebagai *Magna Carta* keantariksaan.⁵

⁵ *Loc. Cit*, Yasidi Hambali, hal.58

Prinsip-prinsip yang bersifat umum yang diletakkan di dalam *Space Treaty* adalah:⁶

- 1) Prinsip non-diskriminasi, yaitu bahwa antariksa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, harus dimanfaatkan untuk kepentingan semua bangsa, tanpa membeda-bedakan tingkat ekonomi dan teknologi diantara mereka.
- 2) Prinsip persamaan (*equality*), yaitu bahwa antariksa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, dinyatakan bebas untuk dimanfaatkan oleh setiap negara atas dasar persamaan.
- 3) Prinsip kerja sama, yaitu bahwa kerjasama antar negara harus melandasi kebebasan untuk melakukan penelitian ilmiah atas antariksa, termasuk bulan dan benda langit lainnya.

Dari prinsip *Space Treaty* diatas yang sudah memuat perjanjian untuk kegunaan antariksa, Indonesia menjalin kerjasama dengan Tiongkok bertujuan untuk mempelajari dan mengembangkan teknologi antariksa yang Tiongkok miliki untuk keperluan damai dan kepentingan suatu negara

⁶ Ibid, hal.60

untuk keamanan wilayah maupun kedaulatan negaranya sendiri.